

## **NAMA PROYEK**

“Mendorong Kebijakan Desa yang Inklusif Melalui Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Disabilitas pada Komunitas Adat di Kab. Sigi”

## **LATAR BELAKANG**

Program Penguatan Tata Kelola Kampung (PATAKA), juga dikenal sebagai ESTUNGKARA, bertujuan mendorong kebijakan desa yang inklusif dengan memberdayakan perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas di komunitas adat Kabupaten Sigi. Sejak 2022 hingga 2024, ESTUNGKARA telah mendampingi dan memperkuat sembilan desa di tiga kecamatan yang menghadapi diskriminasi sosial. Program ini menjadikan masyarakat adat sebagai aktor utama yang mandiri dalam memperjuangkan hak atas layanan sosial, kebijakan, dan ruang hidup, yang berdampak pada peningkatan ekonomi mereka. Upaya utama selama tiga tahun terakhir meliputi:

- Pelatihan kapasitas untuk pemerintah desa, forum, kader, dan masyarakat berperspektif GEDSI (Gender, Equity, Disability, Social Inclusion);
- Fasilitasi kebijakan di desa dan kabupaten, seperti peraturan desa tentang pengelolaan hutan adat di Marena dan Masewo, serta peraturan daerah tentang perlindungan penyandang disabilitas di Sigi;
- Pembentukan forum perempuan di sembilan desa untuk memastikan suara perempuan dan kelompok marginal terdengar dalam perencanaan desa;
- Pendirian tujuh kelompok usaha—lima kelompok perhutanan sosial, satu kelompok wanita tani, dan satu koperasi simpan-pinjam perempuan—yang fokus pada madu hutan, kopi, dan anyaman;
- Pengakuan kelembagaan kelompok melalui surat keputusan desa, sehingga mereka dapat mengakses bantuan ekonomi pemerintah daerah;
- Pemetaan dan pengajuan dua desa (Pelempea dan Banasu) sebagai wilayah adat, dengan advokasi lanjutan agar segera dikeluarkan SK Bupati.

## **TUJUAN**

Secara umum, ESTUNGKARA hingga 2025 bertujuan mewujudkan masyarakat pedesaan yang berdaya dan inklusif melalui:

- Penguatan tatanan sosial,
- Reformasi kebijakan desa dan supra-desa,
- Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat adat.

## **FOKUS KAMI**

Pendampingan difokuskan pada lima desa lama yang masih sangat membutuhkan dukungan, yaitu:

- Desa Lonca (Kec. Kulawi), Desa Peana, Pelempea, Banasu, dan Masewo (Kec. Pipikoro). Empat desa lainnya (Toro, Marena, Moa, dan Porelea) dianggap telah mandiri dan tidak lagi memerlukan intervensi langsung.
- Strategi Pelaksanaan
- Pendampingan & Pengorganisasian
- Peningkatan kapasitas masyarakat adat dan perempuan melalui pelatihan, audiensi, dan dialog dengan pemerintah desa/daerah.

- Advokasi Kebijakan Desa (RPJM-Desa)
- Memastikan partisipasi perempuan, anak, dan disabilitas dalam perencanaan desa agar kebijakan inklusif dapat terakomodasi.
- Advokasi dalam Pengelolaan Hutan Adat (Pampa)
- Melibatkan perempuan dalam penyusunan RKPS (Rencana Pengelolaan Hutan Adat) melalui pelatihan GEDSI dan musyawarah adat;
- Pembentukan KUPS sebagai ruang akses dan kontrol perempuan dalam sumber daya alam;
- Pengembangan model “Sekolah Pampa” bersama Universitas Tadulako untuk revitalisasi agroforestry tradisional perempuan.
- Advokasi Kebijakan Disabilitas: Pembentukan Peraturan Bupati tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyandang Disabilitas yang terintegrasi ke dalam rencana dan anggaran kabupaten.
- Pendanaan Usaha dan Bantuan Agrikultur
- Fasilitasi pengajuan bantuan usaha ekonomi ke pemerintah daerah/provinsi; Dukungan bibit durian “Montong Kani” dari Sausu, Parigi Mountong untuk perempuan adat di lima desa, sebagai afirmasi dan penguatan agroforest pampa.
- Studi MHA (Masyarakat Hukum Adat)
- Dokumentasi praktik baik pengelolaan hutan adat di Kabupaten Sigi;
- Analisis kelembagaan adat dan relasi kuasa negara–adat bersama akademisi Universitas Tadulako

## **WILAYAH KERJA**

2022- 2024 (9 desa)

- Kecamatan Kulawi  
Desa Lonca, Desa Toro, Desa Marena
- Kulawi Selatan  
Desa Moa.
- Kecamatan Pipikoro  
Desa Porelea, Desa Peana, Desa Pelempea, Desa Banasu, dan Desa Masewo.

Tahun 2025 (5 desa)

- Kec. Kulawi  
Desa Lonca
- Kec. Pipikoro  
Desa Peana, Desa Pelempea, Desa Banasu dan Desa Masewo.

**Semuanya di Kabupaten Sigi.**

## **MITRA KERJA**

- Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi
- Pemerintah Desa & BPD
- Lembaga Adat dan Forum Perempuan
- Kelompok Tani & CSO isu GEDSI
- Pemerhimpunan Penyandang Disabilitas (PPDI, Pertuni, HWDI)
- Universitas Tadulako

### **ANGGARAN**

2022: Rp 500 juta

2023: Rp 650 juta

2024: Rp 892,38 juta

2025: Rp 850 juta

Total kumulatif: Rp 2.892,380 Milyar

### **DURASI**

Fase I: 2022–2025

### **DOKUMEN TERKAIT**